



## P E N E T A P A N

Nomor 591/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Mangke bin Baco**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Sami binti Mattenga**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 591/Pdt.P/2014/PA.Wtp. tanggal 30 Mei 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 1978 , para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Kampung Bulu Tanah yang bernama Abd. Karim dengan wali nikah bernama Mattenga (ayah kandung Pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Ismail dan Durusi dengan mas kawin berupa satu batang pohong kelapa dan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 1 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati dan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan.
3. Bahwa para Pemohon memenuhi syarat dan tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja dan telah dikaruniai tujuh orang anak masing-masing bernama :
  - a. Bahar bin Mangke
  - b. Ani binti Mangke
  - c. Jannah binti Mangke
  - d. Mansur bin Mangke
  - e. Sultan bin Mangke
  - f. Kemang bin Mangke
  - g. Ippang bin Mangke
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, sementara ini para Pemohon membutuhkan bukti otentik untuk alas hukum dalam pengurusan untuk mendapatkan buku nikah .

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Mangke bin Baco) dengan Pemohon II (Sami binti Mattenga) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1978 di Dusun Bulu Tanah, Desa Mattampa Waliue, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan

Hal. 2 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi kartu keluarga a.n. Mangke, Nomor 7308120205085198 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 10 September 2009, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Side bin Garancang**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone .

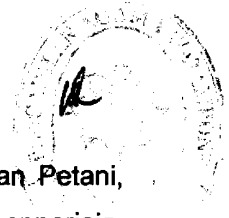
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 1978 di Dusun Bulu Tanah, Desa Mattampa Waliue, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Bulu Tanah yang bernama Abd. Karim, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mattenga, sedangkan saksi nikahnya Ismail dan Durusi dengan mas kawin berupa satu batang pohon kelapa dan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah .

Hal. 3 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Arfah bin Kamaruddin**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kamanakan dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 1978 di Dusun Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Bulu Tanah yang bernama Abd. Karim, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mattenga, sedangkan saksi nikahnya Ismail dan Durusi dengan mas kawin berupa satu batang pohong kelapa dan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah .

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 4 dari 8



Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Mattenga ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Ismail dan Durusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Agustus 1978 di Dusun Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Kampung Bulu Tanah bernama Abd. Karim, di depan Wali bernama Mattenga ayah kandung Pemohon II dengan maskawin satu batang pohong kelapa dan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para Pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai tujuh orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1978 di Dusun Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran

— 5 —



agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syari berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهد ي عدل

Artinya :

*" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Hal 6 dari 8



Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mangke bin Baco) dengan Pemohon II (Sami binti Mattenga) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1978 di Dusun Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 H, oleh Dra. Narniati, S.H., M.H., sebagai hakim dengan dibantu oleh H. Mustaping, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Mustaping, S.Ag.

Hal 7 dari 8



**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	50.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	141.000,00
<i>(seratus empat puluh satu ribu rupiah)</i>				

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)